

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode ini membatasi pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dari sejumlah 12 Bank Umum Syariah yang menjadi populasi, melalui prosedur penentuan sampel sebagaimana dipaparkan dalam bab III, maka diperoleh sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah.

Hasil dari proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Bank
Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia hingga tahun 2017	12
Pengurangan sampel berdasarkan kriteria	(2)
Jumlah Bank yang menjadi sampel penelitian	10

Sumber: Data Sekunder yang diolah,2019

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	IPCG	LN_ASET	ROE	DAR	UDK	KA	UDP
Mean	0.807229	29.64900	5.005857	20.38486	3.714286	0.571429	2.300000
Median	0.806250	29.57500	5.385000	16.12500	3.000000	1.000000	2.000000
Maximum	0.925000	32.10000	57.98000	93.26000	6.000000	1.000000	3.000000
Minimum	0.650000	26.08000	-94.01000	2.790000	2.000000	0.000000	2.000000
Std. Dev.	0.073874	1.426599	17.15494	16.68152	1.023533	0.498445	0.461566
Observations	70	70	70	70	70	70	70

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel diatas, diperoleh nilai rata-rata indeks pengungkapan *corporate governance* 0,807229. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata bank umum syariah dalam hal mengungkapkan tata kelola perusahaan sudah cukup baik. Nilai minimum sebesar 0,65 merupakan nilai terendah dalam hal pengungkapan *corporate governance* pada bank umum syariah yang dimiliki oleh Bank Central Asia Syariah pada tahun 2015. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dalam hal ini hanya sebesar 65% dari seluruh total item yang seharusnya diungkapkan. Nilai maksimum sebesar 0,925 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah sudah hampir maksimal dalam pengungkapan *corporate governance* sebagai wujud dari transparansi.

Variabel ukuran perusahaan (LN_ASET) yang diproksikan ke dalam bentuk logaritma natural dari total aset menunjukkan rata-rata sebesar 29,64900. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata bank umum syariah memiliki total aset sebesar 29,64 (Rp.18.482.993.774.887). Nilai minimum sebesar 26,08 yang berarti aset terendah yang dimiliki oleh bank umum syariah yang dalam hal ini dimiliki oleh Bank Panin Syariah. Nilai Maksimum sebesar 32,10 dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Hal ini

menunjukkan bahwa Bank Syariah mandiri merupakan bank syariah yang memiliki aset paling banyak diantara Bank umum syariah lainnya.

Variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return on Equity (ROE). Berdasarkan tabel diatas profitabilitas menunjukkan rata-rata sebesar 5,005857. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata kemampuan Bank Umum syariah dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas yang dimiliki. Nilai minimum sebesar -94,1 dimiliki oleh Bank Panin Syariah artinya dalam rangka memperoleh laba dengan menggunakan ekuitas yang dimiliki sangat tidak efisien karena menunjukkan nilai yang negatif. ROE yang bernilai negatif tersebut dikarenakan bank tersebut mengalami kerugian sehingga hasil perbandingan laba bersih sebelum pajak dengan total ekuitas yang dimiliki menjadi negatif. Nilai maksimum profitabilitas sebesar 57,98% dimana hal ini berarti dalam penggunaan modal untuk menghasilkan laba sudah cukup efisien karena menunjukkan persentase lebih dari 50%. Bank syariah yang memiliki tingkat profitabilitas tersebut adalah Bank Syariah Mandiri.

Variabel Leverage yang diproyeksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 20,38486. Hal ini berarti dari seluruh bank umum syariah yang menjadi objek penelitian rata-rata memiliki aset yang diperoleh dari hutang sebesar 20,38%. Nilai minimum DAR sebesar 2,79 yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah yang artinya aset yang dimiliki oleh bank tersebut hanya sedikit yang dibiayai oleh hutang. Ketika persentase DAR menunjukkan nilai yang rendah maka

menunjukkan bahwa tingkat keamanan dana yang disimpan di bank cukup aman karena bank memiliki persentase aset yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat hutang yang harus dibayar. Nilai Maksimum sebesar 93,26 dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwasannya aset yang dimiliki oleh Bank Bukopin syariah itu hampir seluruhnya dibiayai oleh hutang yang tentunya tidak baik untuk bank sendiri yang akan mengalami kesulitan dalam rangka menjamin dana yang disimpan karena persentase hutang yang dimiliki bank lebih banyak dibandingkan dengan aset yang dimiliki.

Variabel ukuran dewan komisaris (UDK) yang diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh Bank umum syariah. Berdasarkan tabel di atas ukuran dewan komisaris ditunjukkan dengan rata-rata 3,714286. Hal ini berarti menunjukkan bahwa rata-rata Bank Umum Syariah yang menjadi sampel memiliki keanggotaan dewan komisaris sebanyak 3 orang yang bertugas untuk mengawasi manajemen dalam mengelola Bank. Anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh BUS berkisar antara paling sedikit berjumlah 2 orang dan paling banyak berjumlah 6 orang. Nilai minimum dimiliki oleh Maybank Syariah dan nilai maksimum dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia.

Variabel kualitas audit yang menggunakan variabel dummy. Kategori Bank Umum Syariah yang menggunakan jasa kantor akuntan publik Big Four diberi nilai dummy 1 dan kategori Bank Umum Syariah yang menggunakan jasa selain KAP Big Four diberi nilai dummy 0.

Berdasarkan tabel diatas kualitas audit ditunjukkan dengan rata-rata 0,57. Hal ini berarti menunjukkan bahwa rata-rata Bank Umum Syariah memiliki nilai Dummy 1 yaitu Bank yang menggunakan jasa KAP Big Four seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah mandiri, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, BNI Syariah dan Maybank Syariah.

Variabel Ukuran dewan pengawas syariah yang diproyeksikan dengan jumlah anggota pengawas syariah yang terdapat pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel. Nilai rata-rata menunjukkan 2,30 yang berarti rata-rata bank umum syariah memiliki 2 orang dewan pengawas syariah yang membantu dalam hal mengawasi penerapan *sharia compliance* dalam aktivitas bank. Nilai minimum 2 orang sampai dengan maksimum 3 orang. Nilai maksimum dimiliki oleh 3 Bank Umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega syariah.

B. Pemilihan Model Estimasi

1. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 4. 3 Uji Langrange Multiplier (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	37.33455	2.661260	39.99581
	(0.0000)	(0.1028)	(0.0000)
Honda	6.110201	-1.631.337	3.167035
	(0.0000)	(0.9486)	(0.0008)
King-Wu	6.110201	-1.631.337	2.600802
	(0.0000)	(0.9486)	(0.0047)

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

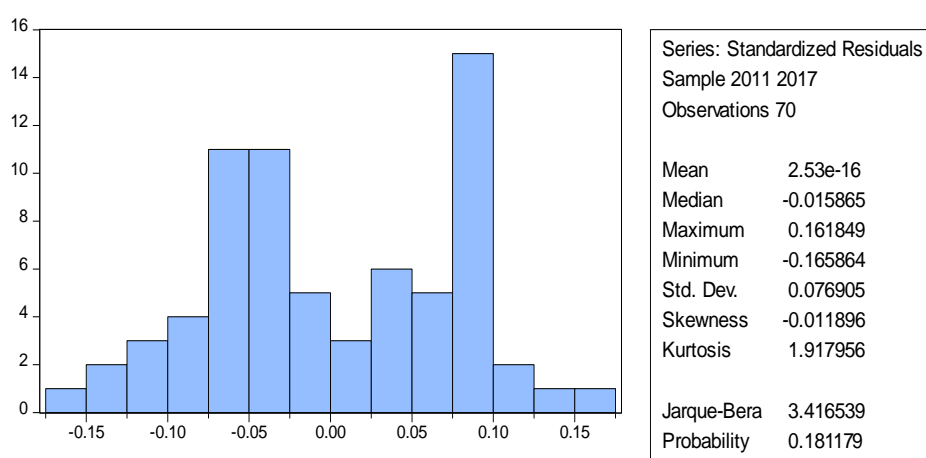
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari pada model common effect. Uji signifikansi random effect dikembangkan oleh Breush Pagan. Metode ini digunakan untuk nilai random effect didasarkan pada nilai residual dari *Ordinary least Square* (OLS). Ketika nilai Lm hitung lebih besar dari nilai kritis maka artinya model yang tepat untuk digunakan pada regresi data panel adalah model random effect. Sedangkan ketika nilai lm hitung lebih kecil dari nilai kritis maka model yang tepat digunakan adalah common effect. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Breush-Pagan sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari nilai kritis 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model model terbaik dalam hal ini adalah model common effect dimana pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu. Semua perilaku sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *ordinary least square/* teknik kuadrat terkecil.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Berikut ini menunjukkan hasil pengujian normalitas:

Tabel 4. 4 Uji Normalitas



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dari probability distribution function menggambarkan bentuk lonceng sehingga dapat dikatakan bahwa residual terdistribusi dengan normal. Selain dilihat dari hal itu nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,181179 atau 18,11% yang berarti diatas tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hal ini membuktikan bahwa data yang digunakan menghasilkan data dengan residual yang terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan uji yang bertujuan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antar variabel independen disebut dengan multikolinieritas. Model regresi yang memiliki hasil yang baik adalah tidak adanya korelasi antara variabel independen. Dibawah ini hasil dari uji multikolinieritas:

Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas

	LN_ASET	ROE	DAR	UDK	KA	UDP
LN_ASET	1.000000	0.492367	-0.032614	0.733684	0.312649	0.614754
ROE	0.492367	1.000000	0.079628	0.169690	-0.050803	0.355040
DAR	-0.032614	0.079628	1.000000	-0.095902	-0.144712	-0.124440
UDK	0.733684	0.169690	-0.095902	1.000000	0.353064	0.490834
KA	0.312649	-0.050803	-0.144712	0.353064	1.000000	-0.062994
UDP	0.614754	0.355040	-0.124440	0.490834	-0.062994	1.000000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diantara variabel independen menunjukkan nilai tolerance dibawah 0,80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen dengan variabel dependen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada regresi linier. Heteroskedastisitas kerap dijumpai pada data cross-section. Hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Prob.
C	-0.277812	0.0601
LN_ASET	0.016251	0.0608
ROE	-0.000227	0.4612
DAR	-0.000423	0.1122
UDK	-0.022328	0.0512
KA	0.006837	0.4998
UDP	-0.029307	0.0848

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2019

Dari tabel tersebut menunjukkan masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwasannya data tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Uji Statistik Data Panel

Model regresi dalam penelitian ini menggunakan metode common effect. Dimana pada pengujian ini tidak menganggap adanya dimensi yang bersifat individu maupun waktu. Data dianggap sama dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini digunakan setelah melewati uji asumsi klasik sebelumnya. Hasil uji regresi data panel sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Uji Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	Prob.
LN_ASET	-0.009889	0.010726	0.3601
ROE	0.000473	0.000567	0.4071
DAR	0.000218	0.000485	0.6541
UDK	0.049708	0.012132	0.0001
KA	-0.016177	0.018618	0.3882
UDP	-0.004382	0.023555	0.8530
C	0.928304	0.268208	0.0010
R-squared			0.293410
Adjusted R-squared			0.226115
F-statistic			4.360094
Prob(F-statistic)			0.000963

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

1. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Pada penelitian ini variabel independen meliputi ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan ukuran dewan pengawas syariah. Dari hasil regresi data panel dengan metode Common Effect menunjukkan nilai R^2 adalah 0,293410 atau 29,34 %. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel terhadap indeks pengungkapan *corporate governance* dapat dijelaskan secara signifikan oleh ukuran perusahaan (LN TA), profitabilitas (ROE), Leverage (DAR), Ukuran dewan komisaris (UDK), Kualitas Audit (KA) dan Ukuran Dewan pengawas Syariah (DPS), sedangkan 70,66 % luas pengungkapan *corporate governance* dapat dijelaskan oleh variabel lain.

2. Uji signifikansi simultan (Uji F)

Uji signifikansi f digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada output uji F menunjukkan bahwa nilai p-value dari F-statistic bernilai 0,000963 dimana mengindikasikan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari nilai kritis 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah ukuran

perusahaan, tingkat profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan ukuran dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan bank umum syariah.

3. Uji signifikansi parameter individual (Uji T)

Variabel ukuran perusahaan (\ln Aset) probabilitas signifikansinya menunjukkan angka 0,3601. Hal ini mengandung arti bahwa tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga **H1 ditolak**. Sehingga berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan Bank umum Syariah di Indonesia.

Pada variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROE nilai signifikansi sebesar 0,4071. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada Bank Umum syariah.

Variabel Leverage (DAR) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6541. Sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada Bank Umum Syariah karena nilainya lebih besar dari 0,05 dengan hal ini maka **H3 ditolak**.

Pada variabel ukuran dewan komisaris juga menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 yaitu 0,0001. Hal ini

sehingga dapat disimpulkan bahwasannya **H4 diterima**, jumlah dewan komisaris pada Bank Umum syariah memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Variabel kualitas audit diperoleh dengan nilai probabilitas sebesar 0,3882. Menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa **H5 ditolak** sehingga kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada Bank umum Syariah.

Pada Variabel ukuran dewan pengawas syariah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,8530 dimana hal tersebut berarti nilai lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H6 ditolak**, dikatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada Bank Umum Syariah.

Tabel 4. 8 Ringkasan Hasil Penelitian

Hipotesis	Hasil
H1 : Terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H1 ditolak
H2 : Terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H2 ditolak
H3 : Terdapat pengaruh positif leverage terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H3 ditolak

H1 : Terdapat pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H4 diterima
H1 : Terdapat pengaruh positif kualitas audit terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H5 ditolak
H1 : Terdapat pengaruh positif ukuran dewan pengawas syariah terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H6 ditolak

E. Interpretasi Hasil

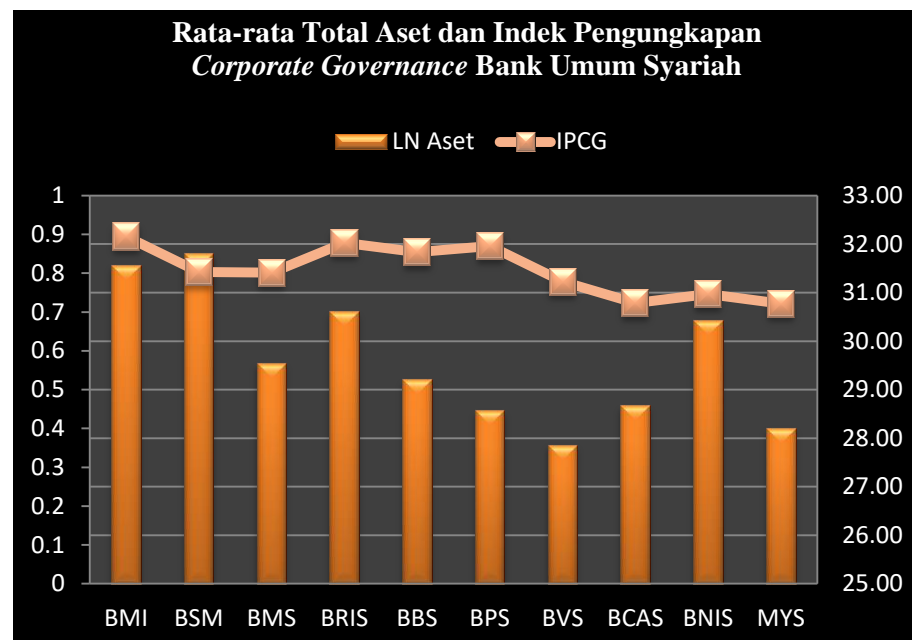
1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,3601. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtanto dan Elvina (2005), Rianto dan surya (2013) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Namun hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hikmah dkk (2011) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Hikmah dkk (2011) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka pengungkapan yang dilakukan oleh pihak

manajemen akan semakin luas sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Namun hal tersebut belum tentu ukuran perusahaan yang kecil tidak melakukan pengungkapan secara luas. Hal ini bisa dilihat dari jumlah IPCG 0,76 pada Maybank Syariah tahun 2013 yaitu menunjukkan total aset 28,46 lebih sedikit dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh BNI syariah tahun 2013 yaitu 30,31 namun IPCG yang diungkapkan hanya sebesar 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aset tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Grafik 4 1 Ukuran Perusahaan dan IPCG



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Grafik diatas menunjukkan data mengenai rata-rata total aset dalam bentuk logaritma natural dan luas pengungkapan *corporate governance* pada masing-masing bank umum syariah selama tahun 2011 sampai dengan 2017. Berdasarkan grafik total aset diatas menunjukkan bahwa rata-rata total aset yang dimiliki oleh bank muamalat indonesia selama kurun waktu 7 tahun terakhir sebesar 31,57 (Rp.52.728.165.123.286)) dengan total pengungkapan *corporate governance* secara rata-rata yaitu 0,89. Selanjutnya Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata aset sebanyak 31,83 (Rp.67.278.619.115.332) berdasarkan grafik diatas total item yang diungkapkan oleh bank syariah mandiri dalam laporan tahunannya sebesar 0,80.

Bank Mega Syariah melakukan pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan didalam laporan tahunannya secara rata-rata selama tahun 2011 sampai dengan 2017 adalah sebesar 0,80 dengan total aset yang dimiliki adalah sebanyak 29,55 (Rp. 5.941.064.806.000). secara rata-rata total aset yang dimiliki oleh BRI Syariah adalah sebesar 30,61 (Rp. 20.927.498.714.286), namun dengan total aset yang cukup besar tersebut BRI Syariah hanya melakukan pengungkapan pada laporan tahunan mengenai pelaksanaan *corporate governance* sebesar 0,87 atau 87% dari total item yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank Bukopin syariah menunjukkan bahwa telah melakukan pengungkapan mengenai tata kelola

perusahaan dalam laporan tahunan secara rata-rata sebanyak 0,85 atau 85% dari total yang seharusnya dengan total aset yang dimiliki sebanyak 29,21 (Rp.5.123.247.072.216). Bank Panin Syariah memiliki rata-rata total aset selama kurun waktu 7 tahun terakhir sebesar Rp. 5.419.719.925.286 (28,57) namun tingkat pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunan menunjukkan sebesar 0,87 atau 87%. Rata-rata total aset yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah adalah 27,86 (Rp.1.336.063.163.207) menunjukkan bahwa secara rata-rata Bank Victoria Syariah memiliki total aset yang paling kecil dibandingkan bank umum syariah lainnya, namun bank ini mampu melakukan pengungkapan terhadap tata kelola perusahaan didalam laporan tahunannya sebesar 0,78 atau 78% dari total yang seharusnya.

Selanjutnya BCA Syariah memiliki total aset sebanyak Rp.3.308.358.138.975 (28,67) dengan luas pengungkapan mengenai *corporate governance* pada laporan tahunannya sebesar 0,72. Secara rata-rata total aset yang dimiliki oleh BNI Syariah adalah sebesar 30,42 (Rp.19.923.871.428.571) dengan total pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan sebesar 0,75 atau 75% dari yang seharusnya diungkapkan dan yang terakhir Maybank syariah yang memiliki total aset secara rata-rata selama 7 tahun terakhir sebanyak Rp.1.838.430.285.714 (28,21) dengan pengungkapan *corporate governance* sebesar 0,72.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwasannya bank yang memiliki rata-rata total aset yang lebih besar belum tentu melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunannya juga akan semakin luas. Hal ini terlihat dari total aset yang dimiliki oleh bank syariah mandiri jauh lebih besar dibandingkan total aset yang dimiliki oleh BRI syariah namun dalam hal pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan dalam laporan tahunannya jauh lebih besar persentase yang diungkapkan oleh BRI Syariah dibandingkan dengan Bank Syariah mandiri. Bukan hanya itu saja terlihat dari total aset yang paling sedikit dimiliki oleh Bank Victoria Syariah dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya, namun dapat dilihat secara seksama bahwasannya dalam hal pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pengungkapan yang dilakukan oleh BNI Syariah yang memiliki total aset yang jauh lebih banyak. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwasannya besar kecilnya bank umum syariah yang diukur dengan total aset yang dimiliki tidak memiliki pengaruh terhadap luas atau tidaknya pengungkapan informasi yang dilakukan mengenai tata kelola perusahaan dalam laporan tahunannya. Bank yang memiliki total aset yang lebih besar belum tentu melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* secara lebih luas dibandingkan dengan bank yang memiliki total aset yang jauh lebih sedikit.

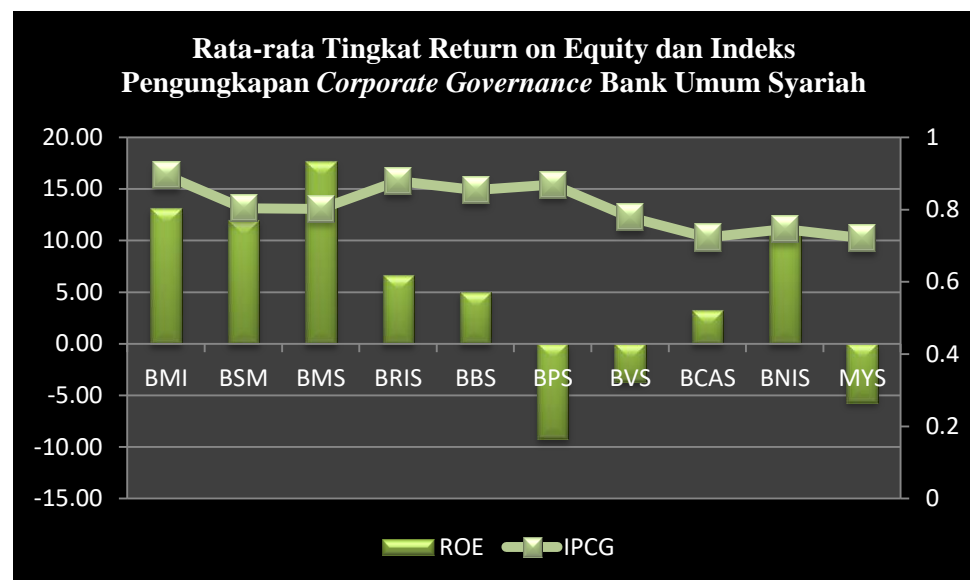
2. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROE (Return on Equity) tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tata kelola perusahaan. Hal tersebut dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,4071. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dkk (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2006) dimana menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Sehingga penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Singhvi dan Desai (1971) dalam Hikmah dkk (2011). Teori light and shadow management yang dikemukakan oleh Jackson dan Carter (1995) menjelaskan secara empiris bahwa bank yang mengalami penurunan profitabilitas akan cenderung untuk melakukan pengungkapan praktik *corporate governance* dalam laporan tahunannya. Tujuan dari

pengungkapan tersebut guna mengantisipasi berbagai penelitaian buruk dari investor dan atau pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank yang memiliki profitabilitas yang tinggi belum tentu akan mengungkapkan tata kelola perusahaannya jauh lebih luas dari pada bank yang memiliki profitabilitas yang rendah.

Grafik 4 2 Tingkat Profitabilitas dan IPCG



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

Grafik diatas menunjukkan tingkat profitabilitas dan indeks pengungkapan *corporate governance* secara rata-rata yang dimiliki oleh bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2011-2017. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity sebesar 13,09 % yang ditunjukkan dengan diagram batang diatas namun dalam hal pengungkapan mengenai tata kelola

perusahaan sebesar 0,89 atau 89% dari total item yang seharusnya diungkapkan.

Bank Syariah Mandiri sendiri melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* sebesar 0,80 dengan tingkat profitabilitas rata-rata yang dimiliki selama 7 tahun terakhir adalah 11,94%. Bank Mega syariah memiliki tingkat return on equity sebesar 17,70 % yaitu nilai rata-rata profitabilitas yang paling tinggi diantara bank umum syariah lainnya selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2017 namun dalam hal pengungkapan *corporate governance* hanya sebesar 0,80 dari total yang seharusnya. BRI syariah telah melakukan pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan pada laporan tahunannya secara rata-rata yaitu sebesar 0,87 atau 87 % dan menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang dimilikinya adalah 6,64%. Selain itu Bank Bukopin syariah yang memiliki tingkat profitabilitas sebesar 5,03% dalam 7 tahun terakhir telah melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* sebanyak 0,85%.

Bank Panin Syariah memiliki rata-rata tingkat profitabilitas yang paling rendah selama kurun waktu 2011-2017 dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat profitabilitas sebesar -9,24%, menunjukkan nilai negatif karena mengalami kerugian sehingga kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari total ekuitas yang dimiliki itu sangat kurang efisien. Dengan tingkat profitabilitas tersebut namun dalam hal pengungkapan

corporate governance Bank Panin menunjukkan angka 0,87 atau 87% dari total yang seharusnya diungkapkan. Bank victoria syariah juga memiliki tingkat profitabilitas secara rata-rata bernilai negatif yaitu -3,70% dengan total pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunannya sebesar 0,78%. BCA Syariah menunjukkan tingkat profitabilitas secara rata-rata yaitu 3,23% dengan pengungkapan mengenai informasi *corporate governance* sebanyak 0,72 atau 72% dari total yang seharusnya diungkapkan. BNI Syariah menunjukkan bahwa telah melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* sebanyak 0,75% dengan tingkat profitabilitas rata-rata sebesar 11,04%. Selanjutnya Maybank Syariah menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas bernilai negatif yaitu -5,67% dengan luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunannya sebesar 0,72 atau 72%.

Berdasarkan pada grafik diatas menunjukkan bahwasannya tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh bank umum syariah cukup beragam membuktikan bahwasannya setiap bank memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sangat bervariasi. Dari grafik diatas menunjukkan bahawa bank umum syariah yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tidak menjamin akan melakukan pengungkapan yang juga lebih luas mengenai tata kelola perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari Bank Mega syariah yang memiliki tingkat

profitabilitas yang paling tinggi yaitu 11,70% dibandingkan dengan bank lainnya melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunannya hanya sebesar 0,80 atau 80% namun bank panin syariah yang memiliki tingkat profitabilitas yang paling rendah diantara 10 bank umum syariah diatas menunjukkan bahwa bank mampu melakukan pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan jauh lebih luas yaitu sebesar 0,87% dengan tingkat profitabilitas yang bernilai negatif yaitu -9,24. Begitu juga dapat dilihat dari BNI syariah yang memiliki tingkat profitabilitas yang cukup tinggi namun dalam hal pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank bukopin syariah yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Sehingga dari garfik tersebut dapat membuktikan bahwannya besar atau sedikitnya tingkat profitabilitas yang diukur dengan return on equity suatu bank syariah tidak menjamin bahwa pengungkapan yang dilakukan dalam laporan tahunannya mengenai *corporate governance* akan lebih luas pula.

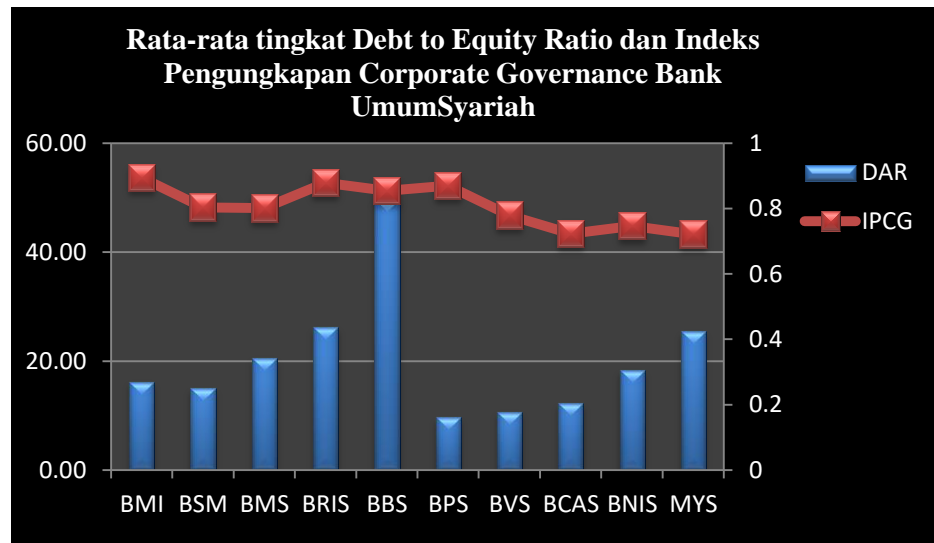
3. Pengaruh Leverage terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage yang diproyeksikan dengan debt to asset ratio (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dengan menunjukkan nilai probabilitas 0,6541. Hasil penelitian ini konsisten

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ovi Ratna (2014) yang menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Abriyan dan Rizqi (2012) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan dikenakan biaya monitoring yang juga tinggi dimana dewan atau manajemen akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas dengan tujuan pemantauan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank yang memiliki nilai leverage yang tinggi belum tentu akan mengungkapkan informasi mengenai tata kelola perusahaan akan lebih luas dibandingkan dengan bank yang memiliki leverage yang lebih rendah.

Grafik 4 3 Tingkat Leverage dan IPCG



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

Grafik diatas menunjukkan rata-rata tingkat leverage yang diukur dengan Debt to Asset Ratio dimiliki oleh bank umum syariah dengan tingkat pengungkapan *corporate governance* selama tahun 2011-2017. Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat aset yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia yang dibiayai oleh hutang adalah sebesar 16,21% jadi nilai tersebut menunjukkan perbandingan antara total asset yang dimiliki dengan total hutang yang dimiliki. Dengan tingkat leverage sebesar itu bank muamalat melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunannya adalah sebesar 0,89 dari total item yang seharusnya diungkapkan. Bank syariah mandiri memiliki tingkat leverage yang sedikit lebih rendah dari Bank Muamalat Indonesia yaitu sebesar 14,96% dengan indeks pengungkapan *corporate governance* sebesar 0,80%.

Selain itu Bank Mega syariah dalam hal mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunannya sebesar 0,80% dengan tingkat leverage yang dimiliki sebesar 20,54%. BRI syariah memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi yaitu 26,23% dengan pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan didalam laporan tahunannya secara rata-rata yaitu 0,87 atau 87%. Dari seluruh bank umum syariah, bank bukopin syariah memiliki tingkat leverage yang paling tinggi yaitu 49,64%, hal ini mengindikasikan bahwasannya bank bukopin syariah memiliki total aset yang hampir setengahnya itu dibiayai oleh hutang. Jadi persentase yang dimiliki oleh bank bukopin syariah hampir 50% aset aset yang dimiliki dibiayai oleh liabilitas. Dengan tingkat leverage yang tinggi bank bukopin syariah melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* sebesar 0,85% hal ini cukup baik dilakukan guna untuk mewujudkan transparansi pada para pemangku kepentingan. Bank panin syariah sendiri memiliki tingkat leverage paling terendah diantara bank umum syariah lainnya yaitu 9,68% yang artinya 9,68% aset yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah dibiayai oleh hutang, ini merupakan persentase yang bagus karena dengan tingkat leverage yang rendah tingkat keamanan dana yang diinvestasikan oleh masyarakat pada bank tersebut cukup tinggi. Namun dari segi pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan bank bukopin syariah

mampu melakukan pengungkapan sebesar 0,87% dari total yang seharusnya diungkapkan pada laporan tahunan.

Bank victoria syariah memiliki tingkat leverage yaitu sebesar 10,63% sengan total indeks pengungkapan *corporate governance* sebesar 0,78%. Tata kelola perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan BCA syariah adalah sebesar 12,27% dengan tingkat leverage yang dimiliki oleh bank yaitu 12,27%. BNI syariah secara rata-rata dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini memiliki tingkat leverage sebesar 18,25 % yang artinya aset yang dimiliki oleh bank sebesar persentase tersebut diperoleh atau dibiayai oleh hutang. Dalam hal pengungkapan *corporate governance* BNI syariah telah melakukan pengungkapan sebanyak 0,75 atau 75% dari total yang seharusnya diungkapkan. Selanjutnya yang terakhir bisa dilihat bahwa tingkat leverage maybank syariah adalah sebesar 25,45% lumayan cukup tinggi karena hampir dari $\frac{1}{4}$ aset yang dimiliki dibiayai oleh hutang, namun dalam segi pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunan maybank syariah telah melakukan pengungkapan sebesar 0,72 atau 72%.

Melalui grafik diatas dapat dilihat bahwasannya tingkat leverage yang tinggi dimiliki oleh bank umum syariah belum tentu mendorong bank untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas mengenai tata kelola perusahaan dalam laporan tahunannya. Hal ini tampak terlihat jelas pada grafik bahwa Bank Bukopin Syariah yang memiliki tingkat

leverage yang paling tinggi tidak melakukan pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan bank muamalat indonesia yang memiliki tingkat leverage yang jauh lebih sedikit. Bukan hanya itu saja terlihat dalam diagram tersebut bahwa Bank Panin Syariah yang memiliki tingkat leverage yang paling rendah melakukan tingkat pengungkapan *corporate governance* yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Maybank Syariah yang memiliki tingkat leverage yang jauh lebih besar dengan tingkat pengungkapan yang cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwasannya tinggi atau rendahnya tingkat leverage yang dimiliki oleh bank umum syariah belum tentu mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Sehingga hasil penelitian ini membantah teori yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan dikenakan biaya monitoring yang tinggi sehingga manajemen akan cenderung untuk meningkatkan pengungkapan untuk tujuan pemantauan.

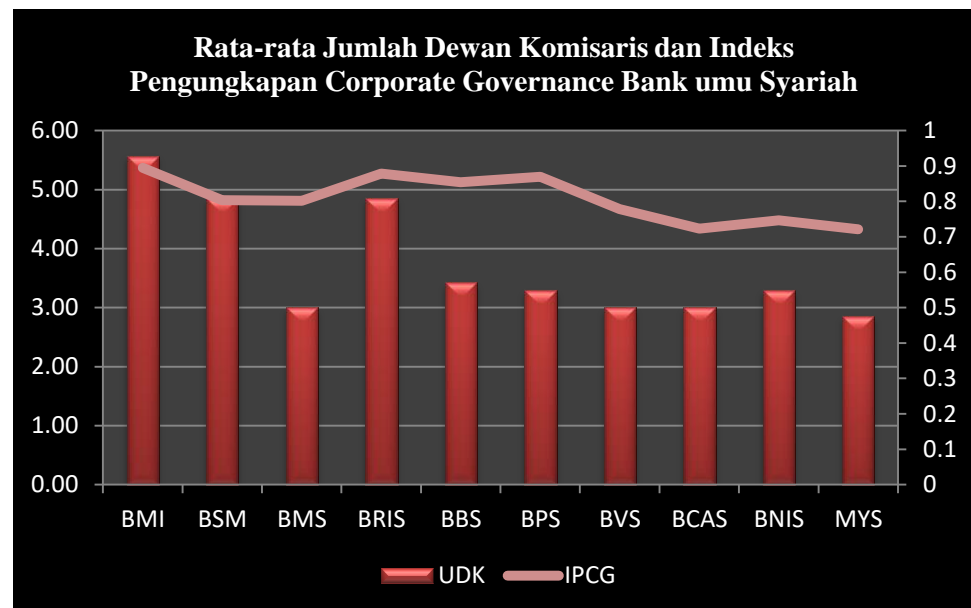
4. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* yang ditunjukkan dengan nilai probabilita 0,0001 ($<0,005$). Sehingga penelitian ini menerima hipotesis penelitian keempat yang

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Hasil ini relevan dengan teori agensi (Jensen Meckling) dan juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hikmah (dkk) yang membuktikan bahwasannya ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dikarenakan dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada pihak manajemen dalam implementasi kebijakan direksi. Sehingga semakin banyak dewan komisaris pada bank akan lebih dalam melakukan pengawasan dan tekanan terhadap manajemen yang tentunya akan semakin besar dalam hal melakukan pengungkapan tata kelola perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Rini (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak sewan komsiaris yang mengawasi suatu bank akan semakin luas pula dalam hal pengungkapan mengenai tata kelola oleh manajemen.

Grafik 4 4 Ukuran Dewan Komisaris dan IPCG



Sumber: Data yang diolah, 2019

Grafik diatas menunjukkan rata-rata jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh bank umum syariah selama tahun 2011-2017 dan luas penungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa Bank Muamalat indonesia rata-rata memiliki 6 orang dewan komisaris yang terdiri atas komisaris utama dan independen yang membantu mengawasi jalannya bank, dengan jumlah dewan komisaris tersebut, bank melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* sebesar 0,89 atau 89% dari total item yang seharusnya diungkapkan. Bank syariah mandiri memiliki rata-rata total pengungkapan mengenai *corporate governance* yaitu sebesar 0,80 dengan jumlah dewan komisaris yang dimiliki adalah sebanyak 5 orang. Bank Mega Syariah dalam aktivitas yang dilakukan hanya memiliki 3 orang dewan komisaris yang membantu memonitoring segala kegiatan yang dilakukan oleh bank, namun dengan jumlah

dewan komisaris yang sedikit Bank Mega Syariah mampu mengungkapkan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunannya sebesar 0,80 atau 80% dari total yang seharusnya diungkapkan.

Hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Indeks pengungkapan *corporate governance* pada BRI syariah menunjukkan angka 0,88 dengan total dewan komisaris yang membantu mengawasi jalannya bank adalah sebanyak 5 orang. Bank Bukopin Syariah memiliki jumlah dewan komisaris sebanyak 3 orang dan melakukan pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan didalam laporan tahunannya yaitu sebesar 0,87 atau 87% dari total yang seharusnya diungkapkan. Bank victoria syariah dan BCA syariah sama-sama memiliki ukuran dewan komisaris sebanyak 3 orang dengan masing masing persentase yang diungkapkan dalam laporan tahunan masing masing bank mengenai tata kelola perusahaan adalah sebanyak 0,78 dan 0,72. Selain itu BNI Syariah dan Maybank syariah juga memiliki dewan komisaris sebanyak 3 orang yang membantu dalam memonitoring jalannya kegiatan manajemen dalam bank tersebut dengan total yang dimiliki tersebut masing-masing bank mampu melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunannya sebesar 0,74 dan 0,72.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwasannya semakin banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki bank maka tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan mengenai

corporate governance akan semakin luas pula. Hal ini kita bisa lihat dari grafik tersebut yang menunjukkan bahwa jumlah ukuran dewan komisaris ini berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Jadi semakin banyak dewan komisaris yang mengawasi jalannya aktivitas bank yang dimiliki oleh bank akan mempengaruhi juga tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan dewan komisaris diperlukan untuk melakukan monitoring dan mengendalikan berbagai tindakan manajemen karena perilaku oportunistiknya. Semakin banyak dewan komisaris yang dimiliki akan semakin mudah dalam hal melakukan pengawasan mengenai tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori coller dan Gregory yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka cenderung lebih mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif sehingga tingkat pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

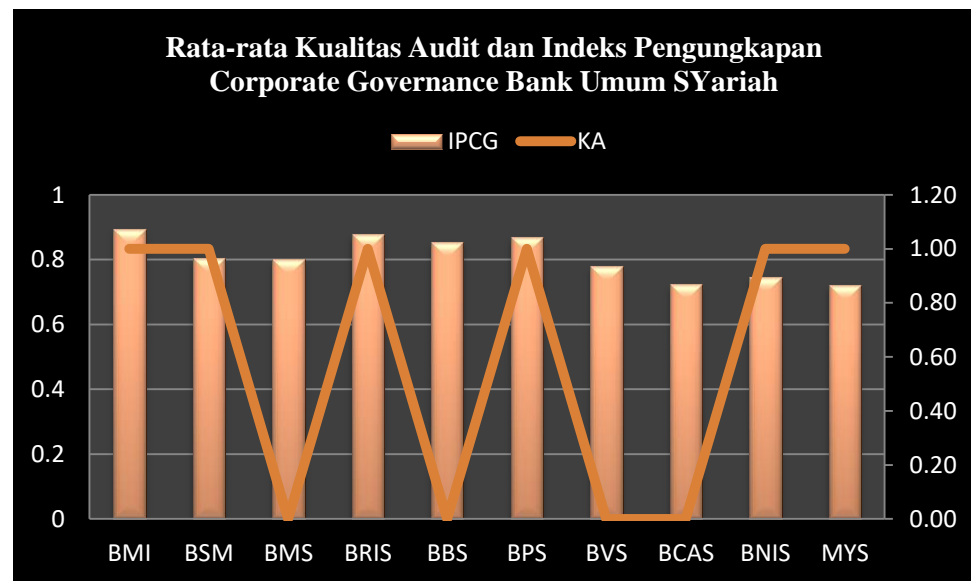
5. Pengaruh kualitas audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Penelitian menunjukkan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,3882. Hasil ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Pranomo (2010) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Namun hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Hormati (2009) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Dari hasil penelitian ini tidak mendukung teori reputasi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas audit dengan Kantor Akuntan Publik, dimana kantor akuntan publik yang berukuran besar akan menghasilkan audit yang berkualitas sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang besar belum tentu akan melakukan pengungkapan yang lebih luas mengenai *corporate governance* dan begitupun juga sebaliknya.

Grafik 4 5 Kualitas Audit dan IPCG



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Grafik diatas menunjukkan data mengenai kualitas audit yang dimiliki oleh bank umum syariah dan tingkat pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan oleh bank dalam laporan tahunan selama tahun 2011-2017. Kualitas audit disini diwakili oleh besar atau kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh bank umum syariah. Dari data diatas menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia diberi nilai rata-rata 1 yang berarti menggunakan jasa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan The Big Four selama tahun 2011 sampai dengan 2017 yaitu KAP Osman Bing Satrio yang berafiliasi dengan KAP Deloitte Touche Thomatsu dan KAP Purwanto, Suherman dan Surja yang berafiliasi dengan KAP Ernst dan Young. Dengan kualitas audit yang berkualitas bank muamalat melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* sebesar 0,89 atau 89% dari total yang seharusnya diungkapkan. Bank Syariah

mandiri juga menggunakan KAP yang berafiliasi dengan BIG Four yaitu KAP Purwanto, Suherman dan Surja yang berafiliasi dengan KAP Ernst dan Young dan KAP Tanudiredja, Wibisana dan rekan yang berafiliasi dengan KAP Price WaterhouseCoopers. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa bank syariah mandiri melakukan pengungkapan *corporate governance* sebesar 0,80.

Bank mega syariah dalam aktivitasnya tidak menggunakan jasa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan The Big Four sehingga diberi nilai dummy 0 dengan tingkat pengungkapan *corporate governance* adalah 0,80 atau 80% dari item yang seharusnya diungkapkan. BRI syariah menggunakan jasa KAP yang termasuk kedalam Big four yaitu KAP Purwanto, Suherman dan Surja dengan total pengungkapan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan sebesar 0,88. Bank Bukopin syariah juga tidak menggunakan KAP yang termasuk kedalam Big Four dengan pengungkapan informasi yang dilakukan yaitu sebesar 0,85 atau 85% dari total yang seharusnya diungkapkan. Bank Panin syariah melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunan sebesar 0,86 dan bank menggunakan jasa KAP yang bekerjasama dengan KAP Big Four yaitu KAP Osman Bing Satrio dan rekan. Bank Victoria Syariah dan BCA syariah dalam memastikan kualitas audit yang dilakukan dalam perusahaan tidak menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan Big Four dengan total

pengungkapan *corporate governance* yaitu sebesar 0,77 dan 0,72 dari total yang seharusnya diungkapkan. Selain itu BNI syariah dan maybank syariah menggunakan jasa KAP Purwantoro, Suherman dan Surja dan KAP Tanudiredja, Wibisana dan rekan dengan masing masing tingkat pengungkapan *corporate governance* yaitu sebesar 0,74 dan 0,72.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa bank yang menggunakan jasa akuntan publik yang besar belum tentu akan melkaukan pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunannya secara lebih luas pula. Hal ini bisa kita lihat dari Bank Bukopin syariah yang tidak menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four melakukan pengungkapan sebesar 0,85 namun Bank syariah mandiri yang menggunakan KAP Big Four hanya mengungkapan informasi sebesar 0,80. Selain itu bisa terlihat dari Bank mega syariah yang menggunakan jasa akuntan publik yang besar namun hanya mengungkapkan *corporate governance* sebesar 0,80 berbanding terbalik dengan Maybank Syariah yang menggunakan jasa KAP Big Four dengan tingkat pengungkapan yang lebih rendah yaitu 0,72 atau 72% dari total yang seharusnya diungkapkan. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak relevan dengan teori yang menyatakan bahwa jika ukuran Kantor Akuntan Publik besar maka akan menghasilkan kualiatas audit yang juga lebih berkualitas dan akan cenderung mempertahankan reputasinya dengan melakukan

pengungkapan secara lebih luas. Hal ini tidak terbukti sehingga besar kecilnya KAP yang digunakan oleh bank dalam menghasilkan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan oleh bank. Penggunaan KAP yang besar belum tentu memberikan informasi yang lebih luas dibandingkan bank yang menggunakan ukuran KAP yang kecil.

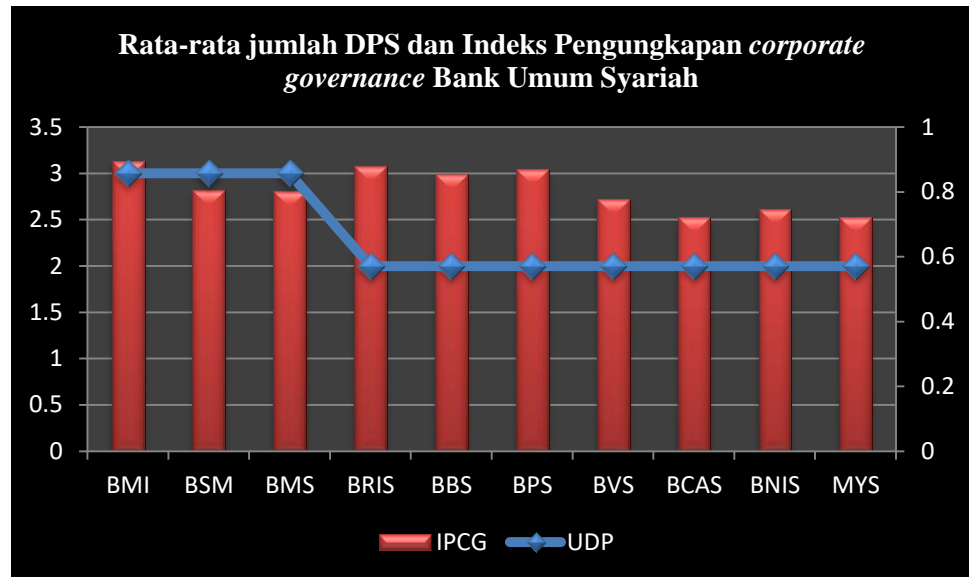
6. Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah menunjukkan nilai 0,8530 yang berarti ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil tersebut cenderung relevan dengan penilitaan yang dilakukan oleh Ovi Ratna (2014) dan Mutmainah alwi (2015) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah memiliki tugas untuk memberikan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan jalannya kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah yang dimiliki, maka kinerja bank akan semakin efektif dan pengungkapan yang dilakukan akan semakin luas. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya semakin banyak

jumlah dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh untuk bank melakukan pengungkapan *corporate governance*.

Grafik 4 6 Dewan Pengawas Syariah dan IPCG



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata bank umum syariah memiliki dewan pengawas syariah dan luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan tahun 2011 sampai dengan 2017. Dari grafik tersebut nampak sekali terlihat bahwasannya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah memiliki masing-masing 3 orang dewan pengawas syariah yang membantu mengawasi jalannya aktivitas bank dan bertugas untuk memberikan saran dan nasihat kepada direksi agar tetap menjalankan kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Dengan jumlah DPS tersebut Bank Muamalat melaksanakan pengungkapan mengenai *corporate governance* sebesar 0,89, Bank Syariah Mandiri Sebesar

0,80 dan bank Mega Syariah sebesar 0,80 atau 80% dari total yang seharusnya diungkapkan. BRI Syariah memiliki dewan pengawas syariah sebanyak 2 orang dengan rata-rata tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan yaitu sebesar 0,87.

Bank Bukopin syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Victoria syariah juga mempunyai 2 orang dewan pengawas syariah yang membantu dalam mengawasi jalannya aktivitas bank dengan masing-masing pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai *corporate governance* yaitu sebesar 85%, 87% dan 78% dari total yang seharusnya diungkapkan. Selain itu juga BCA Syariah melakukan pengungkapan mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunannya yaitu sebesar 0,72 dengan diawasi oleh 2 orang Dewan pengawas syariah. BNI syariah dan Maybank Syariah juga begitu diawasi oleh 2 orang dewan pengawas syariah dan mampu melakukan pengungkapan secara rata-rata sebesar 0,75 dan 0,72.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bawhasannya banyak sedikitnya dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh bank umum syariah tidak menjamin akan luas atau tidaknya pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari bank syariah mandiri yang memiliki lebih banyak dewan pengawas syariah namun lebih sedikit dalam hal mengungkapkan tata kelola perusahaan dibandingkan dengan Bank Panin Syariah yang hanya memiliki 2 orang dewan pengawas syariah. Selain itu juga BRI Syariah yang

memiliki sedikit dewan pengwas syariah lebih luas dalam hal mengungkapkan *corporate governance* dalam laporan tahunannya dibandingkan dengan Bank Mega syariah dengan total pengawas yang lebih banyak. Dari penelitian ini tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mengawasi bank, maka kinerja bank akan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan akan semakin luas. Hal ini tidak sesuai karena banyaknya dewan pengwas syariah yang dimiliki oleh bank umum syariah belum bisa menjamin bank untuk melakukan pengungkapan tata kelola perusahaan yang lebih luas pula begitupun sebaliknya.